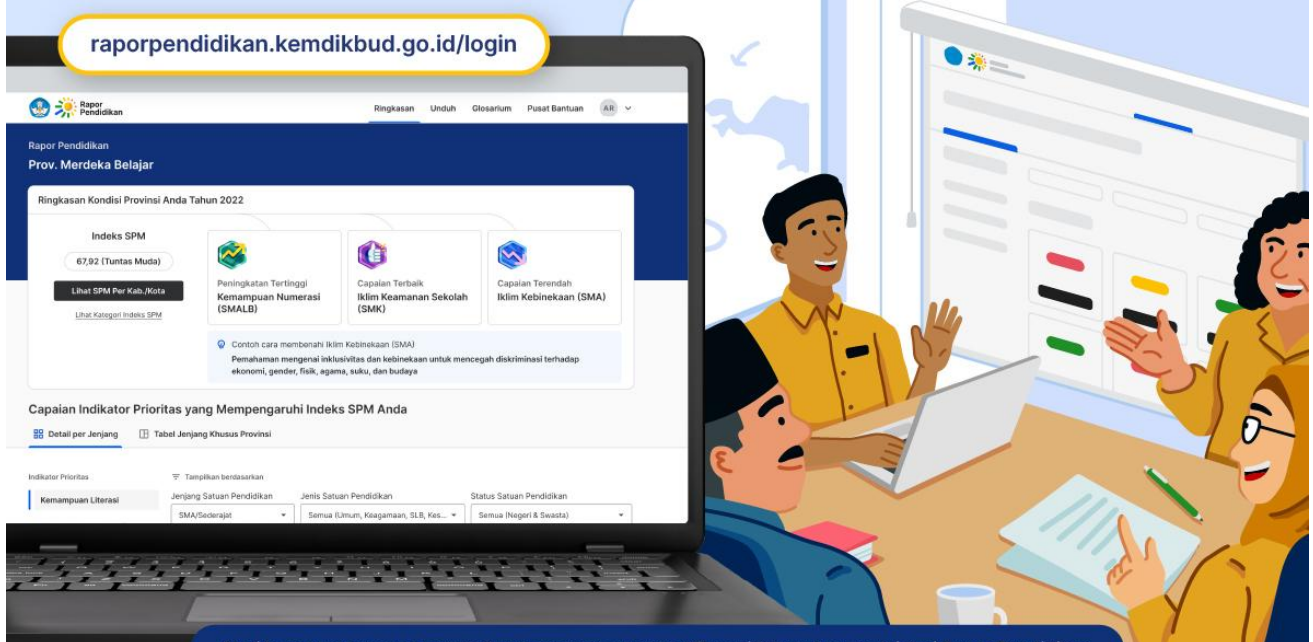


Buku Pedoman Perencanaan Daerah untuk Pemenuhan SPM Pendidikan

Temukan capaian kualitas pendidikan daerah Anda dan lakukan perencanaan pembenahan yang **#SesuaiKebutuhan**

raporpendidikan.kemdikbud.go.id/login



raporpendidikan.kemdikbud.go.id/login

Rapor Pendidikan
Prov. Merdeka Belajar

Ringkasan Kondisi Provinsi Anda Tahun 2022

Indeks SPM
67,92 (Tuntas Muda)

Lihat SPM Per Kab./Kota
Lihat Kategori Indeks SPM

Peningkatan Tertinggi Kemampuan Numerasi (SMALB)

Capaian Terbaik Iklim Keamanan Sekolah (SMK)

Capaian Terendah Iklim Kebinekaan (SMA)

Contoh cara membenahi iklim kebinekaan (SMA)
Pemahaman mengenai inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya

Capaian Indikator Prioritas yang Mempengaruhi Indeks SPM Anda

Detail per Jenjang | Tabul Jenjang Khusus Provinsi

Indikator Prioritas

Kemampuan Literasi

Tampilkan berdasarkan

Jenjang Satuan Pendidikan

Jenis Satuan Pendidikan

Status Satuan Pendidikan

SMA/Sederajat

Semua (Umum, Keagamaan, SLB, Kes...)

Semua (Negeri & Swasta)

Mari bergotong royong melakukan perencanaan yang **#SesuaiKebutuhan**, mulai dari Rapor Pendidikan

raporpendidikan.kemdikbud.go.id

Buku Pedoman Perencanaan Daerah untuk Pemenuhan SPM Pendidikan

Bab 1: Perencanaan Daerah untuk mencapai tujuan Pendidikan

1.1 Tujuan perencanaan sesuai undang-undang

Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa "Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional". Perencanaan pembangunan daerah tersebut antara lain didasarkan pada berbagai hal dengan tujuan mendapatkan perencanaan yang baik dan implementasi yang bermakna.

Perencanaan dibagi menjadi beberapa tingkatan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk periode 20 tahun (RPJPN), Rencana Jangka Menengah atau 5 Tahun (RPJMN), hingga Rencana Jangka Pendek atau 1 Tahun (RKP). Tidak hanya di tingkat nasional, perencanaan daerah juga memiliki tiga tingkatan yang tidak berbeda dengan tingkat nasional yaitu RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada rencana pembangunan daerah yang memuat gambaran tentang kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang langsung dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pada tataran perencanaan yang lebih panjang dan untuk keserasian nasional, RKPD dikendalikan oleh RPJMD dan RKP.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kelanjutan dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, yang meliputi Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan Kerangka Pendanaan Bersifat Indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJMN).

Sinkronisasi perencanaan jangka panjang dan jangka menengah dilakukan dengan menggunakan RPJPD sebagai acuan pada saat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagaimana halnya penyusunan RPJMN juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPD memuat visi misi dan sasaran pembangunan daerah

selama 20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam bentuk arah kebijakan periode lima tahunan di dalam RPJMD.

1.2 Tujuan perencanaan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal dan Indeks SPM Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) akan menjadi acuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan, pemantauan, dan pertanggungjawaban pelayanan. Dengan adanya SPM diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan, memenuhi kebutuhan penyelenggara pelayanan, membiayai pengembangan pelayanan, menambah jumlah dan memperluas jangkauan pengguna. Jika diterapkan dengan baik dan benar, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat mempengaruhi jangkauan pelayanan dan kemandirian dalam pemberian layanan.

Standar pelayanan minimal pendidikan adalah pengaturan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar Pendidikan yang merupakan urusan wajib negara yang sekurang-kurangnya menjadi hak setiap peserta didik. Salah satu tujuan pemerintah sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, bidang pendidikan mendapat perhatian khusus dari negara dan menjadi urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM).

Standar teknis Pelayanan Minimal bidang Pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022, mencakup beberapa aspek, yaitu: (1) Jenis dan penerima pelayanan dasar; (2) Mutu Pelayanan Dasar; (3) Pencapaian SPM Pendidikan; dan (4) Pelaporan dan Evaluasi.

Pencapaian SPM Pendidikan dilaksanakan berdasarkan tiga tahapan, yaitu: (1) Perencanaan Pemenuhan Capaian SPM Pendidikan oleh Pemerintah Daerah; (2) Pelaksanaan Pemenuhan SPM Pendidikan; dan (3) Perhitungan Capaian SPM Pendidikan mengenai Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Penerapan SPM dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penghitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks

Pencapaian SPM yakni (a) capaian Mutu Pelayanan Dasar; dan (b) capaian penerima Pelayanan Dasar yang mengacu pada Permendagri 059 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai

Bab 2: Kebijakan merdeka belajar sebagai pendorong tercapainya tujuan pendidikan

2.1 Masalah Pendidikan di Indonesia

Pada hasil Asesmen Nasional 2021 terdapat isu kompetensi peserta didik di Indonesia. Tercatat 1 dari 2 peserta didik belum mencapai kompetensi minimum literasi. Sedangkan dalam numerasi, tercatat 2 dari 3 peserta didik belum mencapai kompetensi minimum. Selain itu, ditemukan kesenjangan kompetensi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Performa satuan pendidikan terbaik di salah satu kabupaten di luar Pulau Jawa setara dengan performa satuan pendidikan terburuk di salah satu kota di Pulau Jawa.

Hasil Asesmen Nasional 2021 juga memberikan gambaran yang tidak jauh berbeda dengan hasil PISA tahun 2018 yang diselenggarakan oleh **Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)**, yang mana Indonesia menduduki **peringkat 72 dari 77 negara**. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelajar Indonesia memiliki kemampuan literasi matematika, sains dan membaca yang cukup rendah. Adapun hasil kemampuan siswa Indonesia pada PISA 2018 yaitu; (1) skor rata-rata dalam matematika 379, sedangkan rata-rata skor OECD 487; (2) Skor rata-rata dalam sains 389, sedangkan rata-rata skor OECD 489; (3) Skor rata-rata siswa Indonesia dalam membaca 371, sedangkan rata-rata skor OECD 487.

Hal tersebut tentunya menjadi tantangan bagi Indonesia, oleh sebab itu untuk menjembatani tantangan dan kesenjangan tersebut harus menjadi prioritas utama pemerintah dan *stakeholder* terkait dalam proses pemulihan pendidikan.

2.2 Kebijakan Merdeka Belajar untuk menyelesaikan masalah Pendidikan di Indonesia

Di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 disebutkan bahwa "setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Hal ini menjadi amanat bagi Pemerintah untuk menjalankan penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh warganya. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan bahwa "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk pendidikan bermutu". Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, namun secara spesifik pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Pasal 11 ayat 1 UU Sisdiknas secara

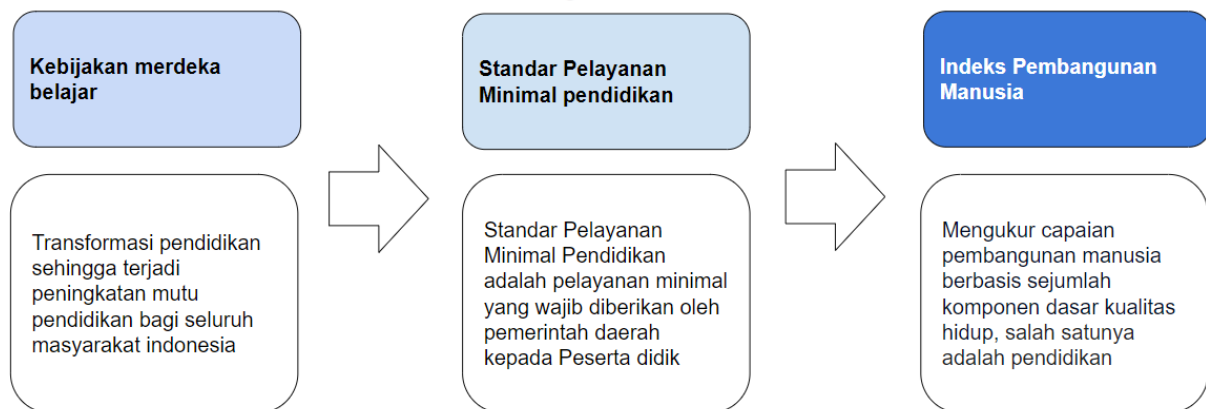
eksplisit menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara.”

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global dan mengadopsi sebagai **Visi Pendidikan Indonesia**. Untuk itu, Misi yang ditetapkan adalah: (1) Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi; (2) Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; dan (3) Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Kebijakan Merdeka Belajar dibuat untuk mewujudkan tercapainya **Visi Pendidikan Indonesia**. Secara garis besar, terdapat dua tujuan besar dari kebijakan Merdeka Belajar. Pertama, mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Kedua untuk mencapai asas keadilan, dimana pendidikan yang berkualitas tersebut dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Sampai saat ini setidaknya telah ada dua puluh tiga episode Merdeka Belajar (MB) yang telah diluncurkan oleh Kemendikbudristek RI. Berbagai kebijakan MB tersebut dikeluarkan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemerintah telah berupaya untuk secara terus menerus menyediakan layanan pendidikan yang bermutu di Indonesia. Pemerintah telah secara masif memberlakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh warganya, antara lain melalui Program Wajib Belajar 6 Tahun, Program Wajib Belajar 9 Tahun, dan Program Percepatan Pembangunan PAUD.

2.3 Kesesuaian Kebijakan Merdeka Belajar dengan indikator Standar Pelayanan Minimal, Indeks SPM Pendidikan dan tujuan besar Indeks Pembangunan Manusia



Gambar. 2.1 Alur keterkaitan Kebijakan Merdeka Belajar, SPM, dan IPM

Kebijakan merdeka belajar selain untuk menyelesaikan masalah umum pendidikan di Indonesia, juga dapat mendorong pemenuhan indikator standar pelayanan minimal, indeks standar pelayanan minimal, hingga indeks pembangunan manusia yang menjadi tujuan bersama negara-negara di Dunia, salah satunya adalah Indonesia.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebijakan merdeka belajar merupakan transformasi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi seluruh masyarakat. Berfokus kepada mutu, kebijakan merdeka belajar mendorong kualitas dan kuantitas dari individu yang bersekolah

Tidak hanya sebagai program yang berdiri dan memiliki tujuannya sendiri, kebijakan merdeka belajar juga membantu sektor pendidikan di daerah mencapai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan oleh undang-undang dan regulasi negara di Indonesia seperti penerima layanan dan juga mutu layanan pendidikan bagi seluruhnya

Terlebih, kebijakan merdeka belajar juga menyasar Indeks Pembangunan Manusia yang diwakili atas 3 hal yaitu:

1. Kesehatan: pada indeks pembangunan manusia, kesehatan digambarkan dengan harapan lama hidup. Dimana semakin lama dan panjang harapan hidup seseorang menggambarkan kondisi kesehatan dan pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu
2. Pendidikan: pada indeks pembangunan manusia, pendidikan digambarkan dengan dua indikator hal yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Semakin panjang rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah didapatkan, maka banyak individu yang berpeluang mendapatkan pendidikan yang seharusnya, dan bermutu.
3. Standar hidup layak: pada indeks pembangunan manusia, standar hidup layak digambarkan dengan pendapatan nasional bruto per-kapita. Semakin besar pendapatan nasional bruto per-orang, maka diasumsikan setiap individu akan memiliki peluang standar hidup yang layak.

Berfokus pada pendidikan, kebijakan merdeka belajar yang mendorong partisipasi serta layanan berkualitas juga dapat memenuhi indeks pembangunan manusia sektor pendidikan, yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Tidak hanya partisipasi dan akses terhadap partisipasi, kebijakan merdeka belajar juga melihat kualitas siswa yang berpartisipasi.

2.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat Nasional maupun Daerah, telah dipilih beberapa indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari SPM keseluruhan yang disebut sebagai **indikator prioritas pendidikan**. Indikator prioritas pendidikan atau indikator SPM prioritas dipilih berdasarkan tujuan besar pendidikan yang disandingkan dengan perubahan paradigma yang terjadi.

Tahap mengetahui indikator SPM prioritas merupakan tahap identifikasi, di mana daerah perlu mengidentifikasi apa saja indikator yang memang menjadi penilaian Standar Pelayanan Minimal daerahnya. Indikator prioritas pendidikan berbeda pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Pada bagian ini, dapat dilihat pada penjelasan lebih detail indikator pada Buku Saku Indikator Prioritas Standar Pelayanan Minimal¹

Detail Indikator Prioritas Pendidikan Tingkat Provinsi

No	Kelompok indikator	Nama Indikator (Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021)	Arti dan formula indikator
1.	Angka Partisipasi Sekolah	Jumlah Warga Negara usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS) <u>Sumber data:</u> Survei Ekonomi Nasional/Susenas (Badan Pusat Statistik)	<u>Arti indikator:</u> Banyaknya anak usia 16-18 yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan mana pun <u>Formula indikator:</u> Jumlah peserta didik usia 16-18 dibagi jumlah penduduk usia 16-18

¹ Link buku saku indikator prioritas SPM

https://drive.google.com/file/d/1SswXZMNmDLMSljtFDr3yuCxQPhDvnICU/view?usp=share_link

2.	Kemampuan Literasi dan Numerasi	<p>Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (pada Jenis Pelayanan Dasar: Pendidikan Menengah</p> <p>Sumber data:</p> <p>Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)</p>	<p><u>Arti indikator:</u> Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks.</p> <p><u>Formula indikator:</u> Rata-rata nilai peserta didik berdasarkan kompetensi membaca teks informasi dan teks sastra.</p>
		<p>Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (pada Jenis Pelayanan Dasar: Pendidikan Menengah</p> <p>Sumber data:</p> <p>Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)</p>	<p><u>Arti indikator:</u> Kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika.</p> <p><u>Formula indikator:</u> Rata-rata nilai peserta didik berdasarkan kompetensi pada domain Bilangan, Aljabar, Geometri, Data dan Ketidakpastian.</p>
3.	Kualitas Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan	Tingkat penyerapan lulusan SMK	<p><u>Arti indikator:</u> Besarnya lulus SMK yang terserap ke bekerja, melanjutkan pendidikan, dan/ atau berwirausaha</p> <p><u>Formula indikator:</u> Jumlah Persentase lulusan SMK yang melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, bekerja, dan/atau berwirausaha dalam satu tahun setelah lulus.</p>

		<p>Sumber data:</p> <p><i>Tracer Study</i> (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi), Survei Angkatan Kerja Nasional (Badan Pusat Statistik)</p>	
		<p>Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK</p> <p>Sumber data:</p> <p><i>Tracer Study</i> (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)</p>	<p><u>Arti indikator:</u> Besarnya DUDI SMK yang merasa puas terhadap budaya kerja lulusan SMK</p> <p><u>Formula indikator:</u> Persentase lulusan yang mendapatkan penilaian budaya kerja minimal puas dari DUDI SMK.</p>
4.	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	Indeks iklim keamanan di Satuan Pendidikan	<p><u>Arti indikator:</u> Tingkat lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik dan kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik.</p> <p><u>Formula indikator:</u> Rata-rata nilai indikator yang menggambarkan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik dan kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik.</p>

		<p>Sumber data:</p> <p>Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)</p>	
		<p>Indeks iklim kebinekaan di Satuan Pendidikan</p> <p>Sumber data:</p> <p>Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)</p>	<p><u>Arti indikator:</u></p> <p>Tingkat lingkungan sekolah dalam menyikapi keragaman seperti toleransi agama/kepercayaan dan budaya di lingkungan sekolah serta komitmen kebangsaan warga sekolah dalam wujud kesetiaan dan kebanggaan terhadap bangsa</p> <p><u>Formula indikator:</u> Rata-rata nilai indikator yang menggambarkan sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan. (per Metadata)</p>
		<p>Indeks inklusivitas di Satuan Pendidikan</p> <p>Sumber data:</p> <p>Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)</p>	<p><u>Arti indikator:</u> Tingkat lingkungan sekolah menyikapi keragaman identitas individu terutama disabilitas terutama pada pemerataan akses dan layanan melalui sekolah yang nyaman bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa</p> <p><u>Formula indikator:</u></p> <p>Rata-rata yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa. (per Metadata)</p>

Detail Indikator Prioritas Pendidikan Tingkat Kabupaten/ Kota

No	Kelompok indikator	Nama indikator (Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021)	Definisi dan formula indikator
1.	Angka Partisipasi Sekolah	<p>PAUD : Jumlah Warga Negara usia <i>5-6 tahun</i> yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD</p> <p>DASMEN : Jumlah Warga Negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam dasar</p>	<p><u>Arti indikator:</u></p> <p>Banyaknya anak usia 5-6 yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan mana pun.</p> <p>Banyaknya anak usia 7-15 yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan mana pun.</p> <p><u>Formula indikator:</u></p> <p>Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 5-6 tahun pada daerah yang bersangkutan.</p> <p>Jumlah anak usia 7-15 tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7-15 tahun pada daerah yang bersangkutan.</p>

2.	Kemampuan Literasi dan Numerasi	<p>Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (pada Jenis Pelayanan Dasar: Pendidikan dasar)</p> <p>Sumber data:</p> <p>Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)</p>	<p><u>Arti indikator:</u> Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks.</p> <p><u>Formula indikator:</u> Rata-rata nilai peserta didik berdasarkan kompetensi membaca teks informasi dan teks sastra.</p>
		<p>Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (pada Jenis Pelayanan Dasar: Pendidikan dasar)</p> <p>Sumber data:</p> <p>Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)</p>	<p><u>Arti indikator:</u> Kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika.</p> <p><u>Formula indikator:</u> Rata-rata nilai peserta didik berdasarkan kompetensi pada domain Bilangan, Aljabar, Geometri, Data dan Ketidakpastian.</p>
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	<p>Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B</p>	<p><u>Arti indikator:</u> Menilai kualitas pelayanan satuan Paud yang di akreditasi</p> <p><u>Formula indikator:</u> Persentase jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal B terhadap satuan PAUD yang sudah diakreditasi di kota/kabupaten.</p>

		<p>Pertumbuhan pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah D-IV atau S1</p>	<p><u>Arti indikator:</u> Guru PAUD formal yang memiliki pendidikan minimal S1 atau Diploma-IV di setiap Kabupaten/Kota.</p> <p><u>Formula indikator</u> Persentase guru PAUD formal yang memiliki pendidikan minimal S1 atau Diploma-IV dibandingkan dengan seluruh guru PAUD formal</p>
4.	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	<p>Indeks iklim keamanan di Satuan Pendidikan</p> <p>Sumber data: Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)</p>	<p><u>Arti indikator:</u> Tingkat lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik dan kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik.</p> <p><u>Formula indikator:</u> Rata-rata nilai indikator yang menggambarkan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik dan kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik.</p>

		<p>Indeks iklim kebinekaan di Satuan Pendidikan</p> <p>Sumber data: Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)</p>	<p><u>Arti indikator:</u> Tingkat lingkungan sekolah dalam menyikapi keragaman seperti toleransi agama/kepercayaan dan budaya di lingkungan sekolah serta komitmen kebangsaan warga sekolah dalam wujud kesetiaan dan kebanggaan terhadap bangsa</p> <p><u>Formula indikator:</u> Rata-rata nilai indikator yang menggambarkan sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan. (per Metadata)</p>
--	--	---	---

Bab 3: Akar masalah prioritas, perbaikan prioritas, dan tata cara pemenuhan SPM untuk perencanaan daerah

3.1 Akar masalah pada Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) - Tahap refleksi

Setelah mengetahui indikator standar pelayanan minimal (SPM) prioritas yang digunakan dalam perencanaan daerah sektor pendidikan, perlu didalami perihwal faktor yang berkaitan erat dengan indikator tersebut. Dalam hal ini, indikator yang berkaitan disebut sebagai akar masalah dimana Pemerintah Daerah dapat melakukan refleksi dan mendalami apa saja akar masalah yang dimiliki.

Indikator Prioritas dan kelompok akar masalah Tingkat Provinsi

No	Indikator	Kelompok akar masalah (mayoritas tersedia pada indikator Rapor Pendidikan)
1.	Jumlah anak usia (<i>16-18 tahun / 4-18 tahun disabilitas</i>) yang berpartisipasi pada pendidikan (<i>menengah / khusus</i>) (APS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar anak usia sekolah yang tidak bersekolah 2. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan 3. Biaya personal peserta didik 4. Daya tampung satuan pendidikan bagi anak usia sekolah 5. Akses menuju sekolah
2.	Rerata kompetensi literasi (<i>SMA / SMK / SDLB / SMPLB / SMALB</i>) berdasarkan Asesmen Nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data peta kebutuhan PTK 2. Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru 3. Indeks Distribusi Guru 4. Kualitas pembelajaran
	Rerata kompetensi numerasi (<i>SMA / SMK / SDLB / SMPLB / SMALB</i>) berdasarkan Asesmen Nasional.	

		<p>5. Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru</p> <p>6. Jumlah kepala sekolah yang berasal dari program guru penggerak dan pendidikan calon kepala sekolah</p> <p>7. Jumlah pengawas yang berasal program guru penggerak dan pendidikan calon pengawas</p> <p>8. Proporsi PTK penggerak</p> <p>9. Proporsi PTK bersertifikat</p> <p>10. Pengalaman Pelatihan PTK</p> <p>11. Jumlah PTK yang mengikuti pelatihan TIK</p> <p>12. Pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran</p> <p>13. Kecukupan buku teks dan non teks yang berkualitas</p> <p>14. Indeks Fasilitas TIK</p>
3.	Tingkat penyerapan lulusan SMK	<p>1. Pelaksanaan Tracer Study SMK</p> <p>2. Kepemimpinan kepala SMK dalam mengelola SMK sebagai pembelajaran yang selaras dengan dunia kerja;</p> <p>3. Link and match dengan dunia kerja</p> <p>4. Kualitas pembelajaran selaras dengan dunia kerja</p> <p>5. Keahlian guru dan tenaga kependidikan SMK selaras dengan dunia kerja</p> <p>6. Sertifikasi kompetensi PTK</p> <p>7. Praktisi dunia kerja yang mengajar di SMK</p> <p>8. Lulusan dengan sertifikat kompetensi</p>
	Tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	

		<p>9. Pendataan kemitraan SMK</p> <p>10. Pembinaan talenta kompetensi keahlian peserta didik</p> <p>11. Guru SMK melakukan magang di dunia kerja</p> <p>12. Praktisi dunia kerja yang mengajar di SMK</p> <p>13. Pengelolaan Bursa Kerja Khusus dalam meningkatkan keberkerjaan lulusan SMK</p> <p>14. Penggunaan sarana prasarana pembelajaran selaras dengan dunia kerja</p>
4.	Indeks iklim keamanan (<i>SMA / SMK / SDLB / SMPLB / SMALB</i>)	<p>1. Pemahaman mengenai perundungan, kekerasan seksual, dan hukuman fisik</p> <p>2. Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru</p> <p>3. Program dan kebijakan sekolah tentang perundungan</p> <p>4. Program dan kebijakan sekolah tentang hukuman fisik</p> <p>5. Program dan kebijakan sekolah tentang kekerasan seksual</p> <p>6. Program dan kebijakan sekolah tentang narkoba</p>
	Indeks iklim kebinekaan (<i>SMA / SMK / SDLB / SMPLB / SMALB</i>)	<p>1. Pemahaman mengenai inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya</p> <p>2. Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru</p> <p>3. Program dan Kebijakan mengenai kesetaraan gender</p>

		<p>4. Program dan kebijakan mengenai penanggulangan dan pencegahan intoleransi di sekolah</p> <p>5. Sistem pelayanan pengaduan terkait kejadian intoleransi terhadap seluruh peserta didik</p>
	<p>Indeks inklusivitas (<i>SMA / SMK / SDLB / SMPLB / SMALB</i>)</p>	<p>1. Pemahaman mengenai sikap inklusif terhadap disabilitas</p> <p>2. Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru</p> <p>3. Sistem pelayanan pendampingan kejadian mendukung inklusivitas terhadap seluruh peserta didik</p> <p>4. Layanan disabilitas</p> <p>5. Layanan sekolah untuk murid cerdas dan bakat istimewa</p>

Indikator Prioritas dan kelompok akar masalah Tingkat Kabupaten/ Kota

No	Indikator	Kelompok akar masalah (mayoritas tersedia pada indikator Rapor Pendidikan)
1.	<p>Jumlah anak usia (5-6 tahun / 7-15 tahun / 7-18 tahun) yang berpartisipasi pada pendidikan (<i>anak usia dini / dasar / kesetaraan (PaketA/B/C)</i>) (APS)</p> <p><i>Catatan: Akar masalah Partisipasi bagi jenjang kesetaraan termasuk juga pada akar masalah yang tersedia di indikator Literasi, Numerasi, Iklim Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar anak usia sekolah yang tidak bersekolah 2. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan 3. Biaya personal peserta didik 4. Daya tampung satuan pendidikan bagi anak usia sekolah 5. Akses menuju sekolah 6. Pemenuhan Kebutuhan Guru

2.	<p>Rerata kompetensi literasi (<i>SD/SMP</i>) berdasarkan Asesmen Nasional.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data peta kebutuhan PTK 2. Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru 3. Indeks Distribusi Guru 4. Kualitas pembelajaran 5. Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru 6. Jumlah kepala sekolah yang berasal dari program guru penggerak dan pendidikan calon kepala sekolah 7. Jumlah pengawas yang berasal program guru penggerak dan pendidikan calon pengawas 8. Proporsi PTK penggerak 9. Proporsi PTK bersertifikat 10. Pengalaman Pelatihan PTK 11. Jumlah PTK yang mengikuti pelatihan TIK 12. Pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran 13. Kecukupan buku teks dan non teks yang berkualitas 14. Indeks Fasilitas TIK
	<p>Rerata kompetensi numerasi (<i>SD/SMP</i>) berdasarkan Asesmen Nasional.</p>	

3.	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pendampingan mengenai layanan berkualitas bagi satuan PAUD 2. Kegiatan pendampingan mengenai cara membangun kemampuan fondasi literasi dan numerasi 3. Keamanan Bangunan Satuan 4. Indeks Refleksi dan Perbaikan Pembelajaran oleh Pendidik 5. Penggunaan TIK dalam pembelajaran 6. Proporsi PTK dalam Diklat Teknis 7. Kecukupan konten pembelajaran oleh guru yang berkualitas untuk mengajar 8. Ketersediaan APE
	Pertumbuhan pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah D-IV atau S1	Dukungan kebijakan untuk peningkatan karir guru
4.	Indeks iklim keamanan (<i>SD/SMP</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman mengenai perundungan, kekerasan seksual, dan hukuman fisik 2. Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru 3. Program dan kebijakan sekolah tentang perundungan 4. Program dan kebijakan sekolah tentang hukuman fisik 5. Program dan kebijakan sekolah tentang kekerasan seksual 6. Program dan kebijakan sekolah tentang narkoba

	Indeks iklim kebinekaan (<i>SD/SMP</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman mengenai inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya 2. Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru 3. Program dan Kebijakan mengenai kesetaraan gender 4. Program dan kebijakan mengenai penanggulangan dan pencegahan intoleransi di sekolah 5. Sistem pelayanan pengaduan terkait kejadian intoleransi terhadap seluruh peserta didik
	Indeks inklusivitas (<i>SD/SMP</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman mengenai sikap inklusif terhadap disabilitas 2. Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru 3. Sistem pelayanan pendampingan kejadian mendukung inklusivitas terhadap seluruh peserta didik 4. Layanan disabilitas 5. Layanan sekolah untuk murid cerdas dan bakat istimewa

3.2 Penyelesaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan sub-kegiatan Prioritas - Tahap Benahi

Setelah melalui tahapan identifikasi indikator prioritas pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), mengetahui dan merefleksi akar masalah yang berkaitan dengan indikator prioritas, tahap terakhir adalah menemukan cara untuk mengentaskan akar masalah yang disepakati. Tahap terakhir umumnya disebut dengan benahi, dimana Pemerintah Daerah perlu memilih kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat membenahi akar masalah yang ada, untuk memperbaiki kondisi indikator prioritas yang bermuara pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Contoh indikator Prioritas, akar masalah, kegiatan benahi - Tingkat Provinsi

No	Contoh Indikator	Contoh akar masalah ²	Contoh benahi ³
1.	<p>Angka Partisipasi Sekolah</p> <p>Jumlah anak usia (16-18 tahun / 4-18 tahun disabilitas) yang berpartisipasi pada pendidikan (menengah / khusus)</p>	<p>Contoh salah satu akar masalah dari angka partisipasi sekolah adalah kurangnya daya tampung satuan pendidikan dibandingkan jumlah penduduk anak usia sekolah</p>	<p>Contoh salah satu benahi dari kekurangan daya tampung adalah Pembangunan USB</p> <p>Deskripsi dari pembangunan USB adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung 2. Penyediaan layanan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal: <p>Apa tahapan yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pembangunan USB?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat analisis kebutuhan penambahan unit sekolah baru pada daerah yang membutuhkan. 2. Survei kelayakan lokasi calon pembangunan unit sekolah baru. 3. Melakukan pembangunan unit sekolah baru (termasuk perlengkapan/mebel sesuai standar sarpras) di daerah/lokasi yang telah ditetapkan, baik secara swakelola maupun kontraktual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.	<p>Rerata kompetensi literasi (SMA / SMK / SDLB / SMPLB / SMALB) berdasarkan</p>	<p>Contoh salah satu akar masalah dari rerata kompetensi literasi adalah Jumlah kepala sekolah yang</p>	<p>Contoh salah satu benahi dari jumlah kepala sekolah yang berkualitas belum mencukupi adalah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga</p>

² Akar masalah detail dapat dilihat pada tabel indikator prioritas dan akar masalah tingkat provinsi dan kabupaten kota yang berada pada bagian 3 poin A

³ Benahi detail dapat dilihat pada link yang akan disematkan pada awal April mengacu kepada Lampiran Surat Mendikbudristek tentang indikator prioritas akar masalah yang tertera pada link berikut

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TAAncEmB72A1mvoqe-igLCYbNYY4pvQR-Q2O9-LHIng/edit?usp=share_link

	Asesmen Nasional.	berkualitas belum mencukupi	<p>Kependidikan Pada Satuan Pendidikan</p> <p>Deskripsi dari pengembangan PTK pada satuan pendidikan sekolah adalah</p> <p>1. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah</p> <p>Apa tahapan yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pengembangan PTK?</p> <p>1. Pemetaan kebutuhan kepala sekolah dengan cara menghitung satuan pendidikan yang akan belum mempunyai kepala sekolah dibandingkan dengan jumlah guru penggerak</p> <p>2. Pengangkatan guru penggerak menjadi Kepala Sekolah</p>
3.	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Contoh salah satu akar masalah dari tingkat penyerapan SMK adalah Sertifikasi kompetensi peserta didik masih rendah	<p>Contoh salah satu benahi dari sertifikasi kompetensi pendidik masih rendah adalah Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik</p> <p>Deskripsi dari Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik adalah</p> <p>1. Penyediaan biaya sertifikasi kompetensi bagi Peserta Didik SMK melalui lembaga sertifikasi minimal setingkat LSP P1.</p> <p>Apa tahapan yang dapat dilakukan untuk melaksanakan fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik?</p>

			<p>1. Bantuan pembiayaan siswa untuk ikut uji sertifikasi berstandar BNSP.</p> <p>2. Pendataan kepada siswa yang belum mengikuti uji sertifikasi kompetensi keahlian berstandar BNSP.</p>
4.	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Contoh akar masalah sedang dalam proses diskusi dan akan dilengkapi pada awal bulan April	Contoh benahi, deskripsi, dan tahapan sedang dalam proses diskusi dan akan dilengkapi pada awal bulan April

Contoh indikator Prioritas, akar masalah, kegiatan benahi – Tingkat Kabupaten/ Kota

No	Indikator	Akar masalah	Benahi
1.	Jumlah anak usia (5-6 tahun / 7-15 tahun / 7-18 tahun) yang berpartisipasi pada pendidikan (<i>anak usia dini / dasar / kesetaraan (PaketA/B/C)</i>) (APS)	<p>Contoh salah satu akar masalah dari angka partisipasi sekolah adalah kurangnya daya tampung satuan pendidikan dibandingkan jumlah penduduk anak usia sekolah</p>	<p>Contoh salah satu benahi dari kekurangan daya tampung adalah Pembangunan USB</p> <p>Deskripsi dari pembangunan USB adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung 2. Penyediaan layanan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal: <p>Apa tahapan yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pembangunan USB?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat analisis kebutuhan penambahan unit sekolah baru pada daerah yang membutuhkan. 2. Survei kelayakan lokasi calon pembangunan unit sekolah baru. 3. Melakukan pembangunan unit sekolah baru (termasuk perlengkapan/mebel sesuai standar sarpras) di daerah/lokasi yang telah ditetapkan, baik secara swakelola maupun kontraktual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.	<p>Rerata kompetensi literasi (SD/SMP) berdasarkan Asesmen Nasional.</p>	<p>Contoh salah satu akar masalah dari rerata kompetensi literasi adalah Jumlah kepala sekolah yang berkualitas belum mencukupi</p>	<p>Contoh salah satu benahi dari jumlah kepala sekolah yang berkualitas belum mencukupi adalah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan</p> <p>Deskripsi dari pengembangan PTK pada satuan pendidikan sekolah adalah</p> <p>1. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah</p> <p>Apa tahapan yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pengembangan PTK?</p> <p>1. Pemetaan kebutuhan kepala sekolah dengan cara menghitung satuan pendidikan yang akan belum mempunyai kepala sekolah dibandingkan dengan jumlah guru penggerak</p> <p>2. Pengangkatan guru penggerak menjadi Kepala Sekolah</p>
----	--	--	---

3.	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Tidak tersedianya kegiatan pendampingan mengenai kualitas layanan yang perlu tersedia di satuan PAUD	<p>Contoh salah satu benahi dari tidak tersedianya layanan pendampingan yang memadai adalah melaksanakan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan</p> <p>Deskripsi dari kegiatan pendampingan bagi Satuan PAUD adalah:</p> <p>1) pendampingan konsultatif maupun pendampingan sesuai kebutuhan PAUD dalam hal kelembagaan dan manajemen untuk mencapai PAUD Berkualitas</p> <p>2) pendampingan teknis dan pelaksanaan kegiatan dalam hal kelembagaan dan manajemen untuk mencapai PAUD Berkualitas</p> <p>Apa tahapan yang dapat dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pendampingan?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memetakan satuan PAUD yang belum terakreditasi 2) merancang kegiatan pendampingan yang dapat diikuti oleh satuan PAUD secara efektif dan efisien 3) melaksanakan kegiatan pendampingan 4) menyiapkan wadah komunikasi bagi satuan PAUD yang ingin berkonsultasi
----	---	--	---

4.	Indeks iklim keamanan (<i>SD/SMP</i>)	Contoh akar masalah sedang dalam proses diskusi dan akan dilengkapi pada awal bulan April	Contoh benahi, deskripsi, dan tahapan sedang dalam proses diskusi dan akan dilengkapi pada awal bulan April
----	---	---	---

3.3 Pemenuhan SPM pada formulir Standar Pelayanan Minimal berbasis Permendagri Nomor 59

3.3.1 Jenis formulir SPM yang tersedia

Terdapat beberapa formulir saat melakukan perencanaan daerah yang perlu diisi oleh Pemerintah Daerah, dimana formulir tersebut tercatat pada Permendagri 059 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Formulir 1.A tentang Rekapitulasi kebutuhan data

Rekapitulasi kebutuhan data berisi bermacam indikator yang mewakili tingkat partisipasi, guru, kualitas hasil belajar, pemerataan kualitas hasil belajar, dan kualitas lingkungan belajar. Adapun secara khusus terdapat 2 kelompok indikator yang mewakili kualitas hasil belajar kejuruan dan layanan pendidikan anak usia dini. Kebutuhan data pada formulir ini mewakili indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara umum, bukan indikator SPM Prioritas.

Formulir 1.B tentang Penghitungan kebutuhan mutu minimal layanan pendidikan

Penghitungan kebutuhan mutu minimal layanan pendidikan bertujuan melihat seberapa besar kebutuhan untuk memenuhi mutu minimal layanan pendidikan. Pada formulir tersebut, tersedia kolom kegiatan dan detail atas kegiatan tersebut, kebutuhan, ketersediaan, kebutuhan tambahan dari hasil selisih kebutuhan dan ketersediaan, harga satuan, hingga kebutuhan biaya

Formulir 1.C tentang Rencana pemenuhan SPM pendidikan dan kerangka pendanaan

Rencana pemenuhan SPM pendidikan dan kerangka pendanaan merupakan formulir untuk memperhitungkan berapa besar target yang dibutuhkan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemenuhan dapat berupa jumlah peserta didik, jumlah kegiatan, ataupun lainnya yang relevan untuk pemenuhan Standar Minimal (SPM)

Formulir 1.D tentang: (D.1, D.2) Realisasi pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan; (D.3) rekapitulasi pencapaian pemenuhan SPM

Realisasi pencapaian pemenuhan SPM pendidikan diberikan untuk membandingkan antara target yang telah dibuat pada formulir 1.C dengan yang direalisasikan pada 1.D. Pada bagian 1.D, terdapat formulir detail capaian pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang dicatat pada formulir `1.D.1 dan 1.D.2, sedangkan 1.D.3 merupakan rekapitulasi atas hasil pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal per-jenjang yang ada

Formulir 1.E tentang: (E.1) capaian target SPM Pendidikan; (E.2, E.3) penghitungan indeks pencapaian SPM Pendidikan

Setelah formulir A sampai D, terdapat formulir E yang menunjukkan bagaimana capaian atas realisasi terhadap target yang ditentukan terlampaui atau tidak. Tidak hanya sebatas melihat per-indikator tentang capaiannya, juga terdapat formulir E.2 dan E.3 terkait penghitungan indeks pencapaian SPM Pendidikan. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (IPSPM Pendidikan) merupakan penggambaran kondisi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di suatu daerah

3.3.2 Contoh pengisian setiap formulir SPM

Formulir 1.A: Contoh pengisian rekapitulasi kebutuhan data

No	Jenis pelayanan dasar	Angka partisipasi sekolah anak usia 16 sampai dengan 18 tahun	
		Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan	Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada Provinsi bersangkutan
1	2	3	4
2	Pendidikan menengah (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)	Data indikator utama tersedia pada Rapor Pendidikan	
3	Pendidikan khusus	Data indikator yang menjadi basis perhitungan dapat ditemukan pada sumber data yang telah ditulis pada Buku Saku Indikator SPM ⁴	

Formulir 1.A merupakan rekapitulasi kebutuhan data Pemerintah Daerah yang berdasar pada Permendagri 059 tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

⁴ Link buku saku indikator prioritas SPM

https://drive.google.com/file/d/1SswXZMNmDLMSljtFDr3yuCxQPhDvnICU/view?usp=share_link

(SPM). Terdapat berbagai indikator yang tersedia dan perlu diisi datanya pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Pada contoh diatas, terdapat indikator Angka Partisipasi Sekolah anak usia 16-18 yang perlu diisi oleh Pemerintah Daerah dengan 2 data yaitu: (1) jumlah anak usia 16 sampai dengan 18 tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan; (2) jumlah anak usia 16 sampai dengan 18 tahun pada Provinsi bersangkutan. Data yang dibutuhkan pada contoh diatas pun seluruh kebutuhan data telah tersedia pada rapor pendidikan

Formulir 1.B: contoh penghitungan kebutuhan mutu minimal layanan pendidikan

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9	11	12
1	Program SPM Pendidikan Menengah	% penduduk usia 16-18 tahun	Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Terselenggaranya komunitas belajar	Unit komunitas	50 unit komunitas	30 unit komunitas	20 unit komunitas	Rp 2.000.000,-	Rp 20.000.000,-

Formulir 1.B merupakan penghitungan kebutuhan mutu minimal layanan pendidikan, dimana contoh yang diberikan adalah penghitungan kebutuhan agar penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah memiliki hasil belajar yang berkualitas. Pada bagian ini, terdapat pengisian pada kebutuhan, ketersediaan, selisih, harga satuan dan kebutuhan biaya. Dimana kebutuhan dihitung berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah atas hasil analisis yang ada, ketersediaan merupakan perhitungan existing saat ini, selisih adalah perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan, sedangkan kebutuhan biaya didapat dari harga satuan dengan selisih

Formulir 1.C: Contoh Rencana pemenuhan SPM pendidikan dan kerangka pendanaan

NO	PROGRA M	OUTCO ME	KEGIAT AN	SUBKEG IATAN	KELUA RAN (OUTPU T)	SATU AN	Jumlah sasaran pemen uhan tahun sebelu mnya	Alokasi anggar an tahun sebelu mnya	Sumber dana	Target	Harga satuan	Rp (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program SPM Pendidik an Menenga h	% pendudu k usia 16-18 tahun	Pemen uhan kualitas dan pemer ataan hasil belajar Peserta Didik (SMA/S MK/Pak et C/MA/M AK)	Pembent ukan komunit as belajar dan memasti kan guru, kepala sekolah, dan pengawa s sekolah terlibat aktif dalam komunit as tersebut	Tersele nggaran ya komunit as belajar	Unit komun itas	20 unit komuni tas	Rp 40.000. 000	Pemerin tah daerah	30 unit komunit as	Rp 2.000.0 00,	Rp 60.000. 000

Rencana pemenuhan SPM pendidikan dan kerangka pendanaan dibuat guna menjadi acuan pemerintah daerah dalam melihat bagaimana pengalokasian anggaran atas target yang tersedia. Hal ini penting untuk dilakukan karena penganggaran menjadi salah satu hal utama yang perlu diketahui dan direncanakan dengan baik. Pada formulir ini, terdapat kolom yang perlu diisi yaitu jumlah sasaran, ini dapat ditemukan pada target yang telah dihitung sebelumnya. Selain itu, alokasi anggaran, sumber dana, target, dan harga satuan menjadi kolom yang perlu diisi sesudahnya. Alokasi anggaran dan sumber dana dapat disepakati oleh tim perencana, sehingga kebutuhan akhir dalam juta rupiah dapat ditentukan berdasar pada target dikalikan dengan harga satuan.

Formulir 1.D: Contoh (D.1, D.2) Realisasi pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan; (D.3) rekapitulasi pencapaian pemenuhan SPM

Contoh D.1 dan D.2

No	Keluaran	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)		Sumber dana	Permasalahan	Solusi
			Volume	Rp	Volume	Rp	Volume	Rp			
1	Jumlah komunitas belajar pada jenjang pendidikan dasar (SD/ SMP/ Kesetaraan)	unit komunitas	20	Rp. 40.000.000	15	Rp. 30.000.000	75%	75%	Pemerintah Daerah	Beberapa komunitas belajar tidak berjalan dengan semestinya	Dilakukan koordinasi maksimal untuk menjalankan komunitas belajar
2.*											
3.*											

*keterangan: nomor selanjutnya dapat diisi sesuai dengan kebutuhan

Pada formulir 1.D, terdapat dua tabel yang perlu dipenuhi yaitu realisasi pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan dan juga rekapitulasi pencapaian pemenuhan SPM per-jenjang. Pada realisasi, terdapat kolom keluaran dan satuan yang perlu diisi dan disesuaikan dengan target perubahan yang disepakati sebelumnya. Selain itu, hal yang menjadi gambaran realisasi adalah adanya kolom target, realisasi, dan persentase capaian, dimana dalam kolom tersebut terbagi atas volume (jumlah satuan yang ditargetkan atau tercapai). Terakhir, terdapat penjelasan mengenai sumber dana yang dapat diambil pada formulir sebelumnya, lengkap dengan penjelasan permasalahan dan solusi yang dilakukan

Contoh D.3

No	Kabupaten/ Kota	Capaian (%)					
		Paud	Pendidikan dasar		Pendidikan menengah	SLB	Kesetaraan
			SD	SMP			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kab. Aceh Barat	50%	70%	75%	80%	50%	50%
2	Kab. Aceh Barat Daya	50%	70%	75%	80%	50%	50%
3*							

*keterangan: nomor selanjutnya dapat diisi sesuai dengan kebutuhan Formulir rekapitulasi pencapaian pemenuhan SPM bertujuan melihat secara besar pencapaian target atas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Terbagi juga berdasarkan jenjangnya, maka Pemerintah Daerah dapat melihat persentase capaian detail per-jenjang untuk mengidentifikasi jenjang apa yang mungkin perlu difokuskan/diprioritaskan.

Formulir 1.E: Contoh (E.1) capaian target SPM Pendidikan; (E.2, E.3) penghitungan indeks pencapaian SPM Pendidikan

Contoh E.1

No	Jenis layanan dasar	Capaian penerima layanan dasar (<i>Demand</i>)			Capaian penyediaan layanan dasar			Capaian SPM	Kategori
		jumlah anak usia sekolah	Jumlah siswa bersekolah/ tamat	Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan menengah/ Kejuruan	50.000	35.000	70%	35.000	25.000	71.4%	Sesuai formula Permendagri 059 dan Kepmendikbud 311 tentang perhitungan indeks SPM	Sesuai kategori Permendagri 059
2	Pendidikan khusus								

Formulir capaian target SPM Pendidikan menjelaskan tentang bagaimana capaian penerima layanan dasar, penyediaan, hingga capaian SPM dan kategorinya. Pada bagian capaian penerima layanan dasar, perlu diisi jumlah anak usia sekolah dan jumlah siswa bersekolah/ tamat dengan tujuan melihat seberapa banyak jumlah anak usia sekolah yang telah bersekolah. Setelah itu, terdapat penyediaan layanan dasar dimana tersedia target dan realisasi, tidak berbeda jauh dengan kolom "capaian penerima layanan dasar", kolom capaian penyediaan juga melihat perbandingan target dan realisasi. Terakhir, daerah dapat menghitung capaian SPM dan kategori capaian berlandaskan Permendagri Standar Pelayanan Minimal.

Contoh E.2 dan E3

No	Jenis layanan dasar	Mutu pendidikan			Penerima manfaat		Partisipasi peserta didik		Hasil pencapaian SPM
		Satuan pendidikan	Pendidik	Perlengkapan dasar	Umur 16-18	Umur 4-18	Umur 16-18	Umur 4-18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan menengah/Kejuruan	Capaian indeks SPM keseluruhan dapat dilihat pada rapor pendidikan							
2	Pendidikan khusus	Data detil dapat didasari pada <ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian indikator prioritas SPM di Rapor Pendidikan 2. Tata-cara perhitungan pada Kepmendikbud nomor 311 tentang indeks SPM yang diartikan lebih detil dari Permendagri 059 tentang standar pelayanan minimal 							

Formulir terakhir yang perlu diisi adalah penghitungan indeks pencapaian SPM. Perbedaan dengan formulir E.1 adalah melihat capaian SPM dalam besaran penerima layanan dasar dan besaran penyediaan layanan dasar, sedangkan formulir ini melihat berdasarkan indikator mutu pendidikan, penerima manfaat, dan partisipasi pendidik pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota dengan menghitung pencapaian SPM.